



PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP CSR PERUSAHAAN BUMN

(Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Indonesia Periode 2020-2022)

Benedictus Krisna Putra, Dwi Cahyo Utomo¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to investigate the influence of the characteristics of the board of commissioners on the CSRD of state-owned enterprises (SOEs) in Indonesia. Furthermore, this research attempts to examine the impact of the characteristics of the board of commissioners, measured by using political connections within the board of commissioners, commissioners board meetings, and subcommittee of the board of commissioners. This study utilizes secondary data sourced from the annual reports and sustainability reports of SOEs published on the company's official website. By applying the purposive sampling method, a sample of 72 SOEs registered with the BPS - Statistics Indonesia and publishing annual and sustainability reports for the period 2020-2022 was obtained. The data analysis in this study was conducted using the multiple linear regression method. This study found that political connections within the board of commissioners and commissioners board meetings have a positive and significant influence on CSRD in SOEs. However, the subcommittee of the board of commissioners actually has a negative and significant impact on the CSRD of SOEs. Nevertheless, this research has limitations regarding a limited population and sample size of companies, coverage that only focuses on one aspect so that several hypotheses are rejected, as well as subjectivity in assessing CSRD due to a lack of clear information in the sustainability reports of SOEs.

Keywords: political connections, board meetings, board subcommittees, board of commissioners, CSRD, SOEs

PENDAHULUAN

Pada saat ini isu terkait pemanasan global telah mengakibatkan banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi. Sebagai konsekuensinya, dalam tata kelola perusahaan, *Corporate Social Responsibility* merupakan kewajiban bagi setiap pihak yang berkepentingan. Paek dkk. (2013) berpendapat dalam penelitiannya bahwa *CSR*, merupakan sebuah konsep yang luas dengan makna dan dimensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu *CSR* sangatlah melekat pada masyarakat, dengan berbagai pendekatan literatur disarankan untuk menguji hubungan tersebut. Menurut Benlemlih dan Girerd-Potin (2017) beberapa tahun belakangan ini, kesadaran akan adanya pelaporan *CSR* telah meningkat dari dalam penelitian akademis maupun praktik bisnis. Oleh karena itu pelaporan *CSR* di Indonesia semakin membaik, seiring dengan masalah kerusakan lingkungan yang telah ada. Aktivitas perusahaan kerap menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat, sehingga menuntut pelaksanaan *CSR*. Konsumen cenderung memilih perusahaan yang menjalankan *CSR* dengan baik karena alasan etika bisnis. Di sisi lain, perusahaan yang menerapkan *CSR* dengan baik akan lebih mudah merekrut dan mempertahankan karyawan berkualitas. Selain itu, perusahaan yang

¹ Corresponding author

melakukan *CSR* juga cenderung terhindar dari gugatan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan terhadap masyarakat dan pemerintah.

Sebagai perusahaan BUMN, mereka diwajibkan untuk mengungkapkan kegiatan *CSR* mereka. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan praktik *CSR*, terutama pada perusahaan yang memiliki koneksi politik. Belakangan ini, media massa telah memberitakan mengenai banyaknya individu yang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi, baik sebagai anggota tim suksesnya maupun anggota partai pendukungnya, yang ditunjuk untuk menduduki jabatan-jabatan penting setingkat menteri hingga dewan komisaris di perusahaan BUMN (Citradi, 2020). Indonesia adalah negara berkembang, di mana pemerintahnya memiliki campur tangan yang besar dalam kegiatan ekonomi (Habib dkk., 2017). Beberapa kejadian menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik memperoleh keuntungan dari pemerintah dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki hubungan tersebut. Perusahaan yang terkoneksi politik memperoleh banyak manfaat seperti izin impor bahan baku secara gratis, izin waralaba di sektor perbankan, penggilingan tepung, dan kemudahan di bidang telekomunikasi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto (Nugrahanti, 2021). Keuntungan yang diperoleh dari pemerintah tersebut membuat mereka kurang termotivasi untuk terlibat dalam *CSR*.

Tang dkk. (2020) dalam penelitiannya beranggapan bahwa di antara mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance/CG*), dewan perusahaan memainkan peran sentral terkait *CSR*. Secara tegas, dewan perusahaan memiliki peluang untuk menggunakan *CSR* sebagai cara untuk menyembunyikan tindakan mereka yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Walls dkk. (2012) berpendapat bahwa dewan komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan perusahaan yang ramah lingkungan, mengawasi perilaku manajemen puncak, menyetujui anggaran tahunan, dan membentuk komite khusus yang menangani masalah *CSR*. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai karakteristik dewan komisaris yang mendorong dalam pembuatan *CSR*. Dewan komisaris merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tugas untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada manajemen perusahaan (Yuliani, 2019).

Meskipun banyak studi tentang hubungan antara karakteristik terkait dewan dan *CSR* (Indira dan Syafruddin, 2021; Mohammadi dkk., 2021; Dwekat dkk., 2022), studi-studi tersebut lebih berfokus pada perusahaan non-BUMN dibandingkan BUMN. Generalisasi temuan penelitian dari perusahaan non-BUMN ke BUMN berpotensi bermasalah karena tujuan yang berbeda yang dikejar oleh masing-masing perusahaan. Dalam konteks non-BUMN, beberapa studi terdahulu mengaitkan keterlibatan *CSR* dengan kemungkinan pengungkapan tersebut dalam mempengaruhi pengembalian keuangan positif (Sánchez dkk., 2018). Sementara itu, di BUMN, *CSR* dianggap sebagai kewajiban sosial. Menurut Abang'a dan Tauringana (2023), BUMN di Kenya cenderung memiliki kinerja lebih buruk dalam *CSR* dibandingkan non-BUMN karena mereka mendapat legitimasi politik yang lebih kuat, dengan dukungan keuangan dari pemerintah melalui alokasi anggaran setiap tahun anggaran, yang membuat mereka kurang termotivasi untuk terlibat dalam insentif sosial semacam itu. Hal ini didukung penelitian sebelumnya oleh Salsabilla dkk. (2022) jika kepemilikan pemerintah dan *CSR* memiliki pengaruh negatif pada perusahaan BUMN Indonesia.

Studi terbaru mulai mengkaji pengaruh karakteristik dewan terhadap *CSR* pada BUMN, penelitian ini hanya menganalisis sebagian kecil karakteristik tata kelola seperti ukuran dewan, pendidikan, dan struktur kepemilikan, serta terfokus pada BUMN komersial terdaftar (Saraswati dkk., 2020; Tang dkk., 2020; Masoud dan Vij, 2021; Nugrahanti, 2021; Salsabilla dkk., 2022), tidak menyentuh BUMN tidak terdaftar dan non-komersial. Dengan demikian, penelitian tambahan diperlukan untuk mengkaji faktor-faktor yang belum banyak diteliti pada perusahaan BUMN.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut, diusulkan bahwa Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap *CSRD* Perusahaan BUMN (Studi pada Perusahaan BUMN di Indonesia Periode 2020-2022) mungkin memiliki pola yang berbeda, terutama jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya di yurisdiksi lain. Melalui identifikasi dan penguatan mekanisme tata kelola perusahaan yang bagus, seperti mengoptimalkan karakteristik dewan komisaris yang efisien, penelitian ini berharap bukan hanya menambah literatur yang ada mengenai dewan komisaris dan *CSRD* tetapi juga membantu pembuat kebijakan dan manajer dalam menangani dan memecahkan permasalahan *CSRD*.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa teori agensi mengindikasikan bahwa peran pemantauan dan pengendalian adalah tanggung jawab penting dewan yang membantu menjaga kepentingan pemegang saham. Teori ini mengasumsikan bahwa kepentingan agen dan prinsipal saling bertentangan (*moral hazard*) akibat dari pemisahan kepemilikan dan manajemen, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan sebagai pengendali atas tindakan berlebihan dari agen. Teori agensi juga menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang bagus membentuk perusahaan semakin akuntabel kepada *stakeholders*, serta membantu memitigasi perilaku oportunistik manajerial, sehingga mengurangi biaya agensi (Khairiddine dkk., 2020). Fokus utama teori agensi adalah untuk memastikan akuntabilitas manajer yang mungkin bersikap oportunistik karena asimetri informasi (Eisenhardt, 1989). Dalam perspektif ini, dewan komisaris merupakan mekanisme kontrol utama dalam mengurangi asimetri informasi dengan melakukan rapat internal di antara anggota dewan komisaris sendiri, serta rapat gabungan bersama direksi. Selanjutnya, dewan komisaris perlu membentuk komite-komite atau organ pendukung untuk membantu tugasnya. Akibatnya, perusahaan cenderung terlibat dalam aktivitas *CSR* jika berbagai komite dewan bekerja kolektif dalam mengurangi konflik agensi (Masud dkk., 2018).

Teori Legitimasi

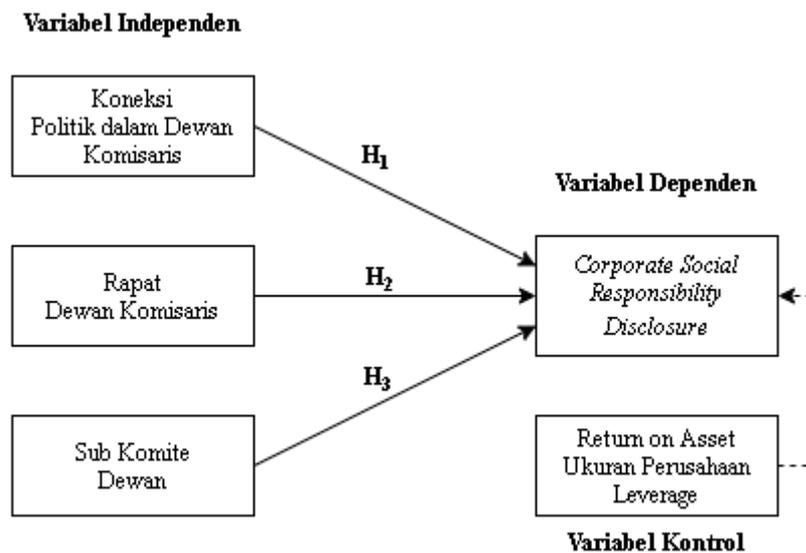
Menurut Muttakin dkk. (2018) teori legitimasi telah banyak diadopsi untuk menjelaskan perilaku *CSRD* perusahaan secara sukarela sebagai strategi komunikasi kinerja *CSR* sebenarnya atau untuk memanipulasi persepsi pemangku kepentingan tentang kinerja tersebut. Hal ini mengimplikasikan bahwa keberlangsungan BUMN hanya mungkin jika aktivitas dan tujuannya didukung dan dipandang sah oleh masyarakat. Organisasi berusaha menyelaraskan tujuan dan operasi mereka dengan batas-batas sosial masyarakat tempat mereka beroperasi, untuk mempertahankan posisi mereka dalam masyarakat, sehingga membentuk kontrak sosial antara organisasi dan masyarakat (Deegan dan Unerman, 2006). Perusahaan berupaya memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat melalui pelaksanaan program-program *CSR*. *CSR* merupakan alat yang dapat mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan bahwa aktivitas perusahaan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat, sehingga keberlangsungan bisnis dapat terwujud (Deegan dkk., 2002). Teori legitimasi memiliki kekurangan karena tuntutan masyarakat cenderung meluas (Al Maeeni dkk., 2022), sehingga pada suatu waktu, organisasi mungkin tidak dapat memenuhi semua tuntutan tersebut, dan konflik menjadi tidak terelakkan. Menurut Muttakin dkk. (2018) meskipun perusahaan dapat menghadapi tekanan politik, sosial, dan ekonomi jika kinerja sosialnya tidak memenuhi ekspektasi masyarakat, strategi yang dipilih perusahaan untuk

mengatasi tantangan tersebut secara proaktif kemungkinan akan bergantung pada pengaturan politik dan peran negara yang terkait. Dalam masyarakat non-pluralis di mana negara dapat mensejajarkan diri dengan kepentingan korporasi (Gray dkk., 1996), perusahaan dapat menggunakan koneksi politik sebagai strategi yang lebih penting untuk kelangsungan hidup mereka daripada melegitimasi melalui *CSR* perusahaan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Koneksi Politik dalam Dewan Komisaris dan CSR

Berdasarkan teori legitimasi, motivasi manajemen untuk melakukan *CSR* adalah untuk memperoleh legitimasi dari *stakeholders* (Deegan dkk., 2002). Dalam konteks ini, pemerintah dapat muncul sebagai pemain utama karena memiliki kewenangan untuk mengontrol sumber daya, terutama di negara-negara berkembang (Dieleman dan Widjaja, 2019). Dalam masyarakat non-pluralis di mana negara dapat mensejajarkan diri dengan kepentingan korporasi (Gray dkk., 1996), perusahaan dapat menggunakan koneksi politik sebagai strategi yang lebih penting untuk kelangsungan hidup mereka daripada melegitimasi melalui *CSR* perusahaan.

Beberapa penelitian menemukan bahwa semakin erat hubungan sebuah perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik, maka semakin besar ketergantungannya pada keuntungan yang diperoleh dari pemerintah. Konsekuensinya, perusahaan tersebut cenderung meningkatkan *CSR* dalam laporan tahunannya. Dengan kata lain, adanya koneksi politik berkorelasi positif dengan *CSR* (Bianchi dkk., 2019; Nugrahanti, 2021). Namun menurut Muttakin dkk. (2018), Jahid dkk. (2020), dan Saraswati dkk. (2020) berpendapat bahwa kehadiran anggota dewan yang memiliki koneksi politik mengurangi *CSR*. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan perspektif teori legitimasi, hipotesis pertama dalam penelitian sebagai berikut:

H1: Koneksi politik dalam dewan komisaris mempunyai dampak negatif terhadap *CSR*

Rapat Dewan Komisaris dan CSRD

Menurut teori agensi, rapat dewan meminimalisir asimetri informasi antara manajemen dan mendorong pengungkapan etis (Jensen dan Meckling, 1976). Pernyataan ini juga didukung oleh Fahad dan Rahman (2020) yang berpendapat bahwa kemampuan dewan dalam memecahkan masalah ditentukan oleh frekuensi rapat dewan. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Pasal 16 ayat (1) rapat Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas wajib diadakan minimal satu kali dalam sebulan. Dengan demikian, dewan komisaris dapat mengadakan banyak rapat sesuai dengan yang dianggap perlu. Studi sebelumnya, seperti Nugraheni dan Khasanah (2019), Katmon dkk. (2019), dan Khairiddine dkk. (2020), menemukan korelasi positif antara *CSRD* dan frekuensi rapat dewan. Studi lain, seperti Abang'a dan Tauringana (2023) dan Agarwala dkk. (2023), menemukan korelasi negatif antara kedua variabel. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, hipotesis kedua dalam penelitian sebagai berikut:

H2: Rapat dewan komisaris mempunyai dampak positif terhadap *CSRD*.

Sub Komite Dewan Komisaris dan CSRD

Fungsi sub komite dewan komisaris terhadap *CSRD* dapat dijelaskan dari perspektif teori agensi. Kekuasaan dan tanggung jawab didistribusikan dengan membentuk komite dewan independen sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani kegiatan *CSR* dengan mengurangi konflik agensi (Masud dkk., 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Pasal 21 ayat (1), perusahaan BUMN diwajibkan untuk membentuk setidaknya komite sekretariat dewan komisaris, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, serta komite lainnya jika diperlukan. Menurut Abang'a dan Tauringana (2023) sub komite dewan memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap *CSRD*. Namun, Ashfaq dan Rui (2019) serta Fahad dan Rahman (2020) mengindikasikan korelasi yang positif dan signifikan antara *CSRD* dan sub komite dewan di lingkungan diluar BUMN. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian sebelumnya dan perspektif teori agensi, hipotesis ketiga dalam penelitian sebagai berikut:

H3: Sub komite dewan komisaris mempunyai dampak positif terhadap *CSRD*.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan BUMN Indonesia, dimana menurut Badan Pusat Statistik (2023), jumlah perusahaan induk BUMN berjumlah 77 perusahaan di tahun 2022. Sampel yang dipakai untuk studi ini adalah perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2020-2022. Kriteria dalam menentukan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan BUMN di Indonesia yang masih tercatat secara aktif di Badan Pusat Statistik Indonesia periode 2020-2022.
2. Perusahaan BUMN tersebut dikelola secara langsung di bawah pengawasan Kementerian BUMN periode 2020-2022.
3. Perusahaan BUMN menyajikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dengan konsisten selama periode 2020-2022.
4. Laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan BUMN yang digunakan memuat informasi yang komprehensif terkait seluruh variabel yang dibutuhkan.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel independen *CSRD* dan variabel dependen Koneksi Politik dalam Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, dan Sub Komite Dewan Komisaris. Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah Return on Assets, Ukuran Perusahaan, dan Leverage. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Independen		
Koneksi Politik dalam Dewan Komisaris	KONPOL	Jumlah dewan komisaris yang berlatar belakang; anggota parlemen, menteri, kepala negara, atau memiliki hubungan dengan pejabat negara, dan sebagai anggota militer
Rapat Dewan Komisaris	RADEW	Frekuensi rapat internal dewan komisaris dan rapat gabungan dewan komisaris dengan dewan direksi pertahun
Sub Komite Dewan Komisaris	KOMDEW	Jumlah komite atau organ pendukung dewan komisaris pada suatu perusahaan
Variabel Dependen <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	<i>CSRD</i>	$CSRIj = \frac{\sum x_{ij}}{nj}$ <p>Keterangan: <i>CSRIj</i> : <i>Corporate social responsibility index</i> perusahaan <i>nj</i> : Total indikator maksimal yang diungkapkan <i>xij</i> : Total indikator yang diungkapkan (1 = jika indikator diungkapkan; 0 = jika indikator belum diungkapkan)</p>
Variabel Kontrol		
<i>Return on Asset</i>	ROA	Persentase laba bersih perusahaan terhadap total aset
<i>Ukuran Perusahaan</i>	UKPER	Ln x Total Penjualan
<i>Leverage</i>	LEV	Persentase total hutang perusahaan terhadap total aset

Metode Analisis

Untuk menganalisis hipotesis penelitian, peneliti memakai metode analisis regresi linear berganda. Ketika melakukan analisis regresi, kita bisa mengetahui pengaruh variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2021: h.145-146). Analisis regresi memberikan informasi tentang sifat hubungan, apakah positif atau negatif, di antara variabel-variabel yang diteliti. Model regresi yang dipakai sebagai berikut:

$$CSRD = \alpha + \beta_1KONPOL + \beta_2RADEW + \beta_3KOMDEW + \beta_4ROA + \beta_5UKPER + \beta_6LEV + e$$

Keterangan:

- CSRD* = *Corporate Social Responsibility Disclosure*
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- e* = Error
- KONPOL = Koneksi Politik dalam Dewan Komisaris
- RADEW = Rapat Dewan Komisaris
- KOMDEW = Sub Komite Dewan Komisaris
- ROA = *Return on Asset*

UKPER = Ukuran Perusahaan
LEV = *Financial leverage*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Peneliti memperoleh sampel sebanyak 72 sampel dari 77 populasi perusahaan induk BUMN. Total terdapat 24 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Berikut kriteria penentuan sampel yang telah ditentukan:

Tabel 2
Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan BUMN di Indonesia yang masih tercatat secara aktif di Badan Pusat Statistik Indonesia periode 2020-2022.	77
Perusahaan BUMN tersebut dikelola secara langsung di bawah pengawasan Kementerian BUMN periode 2020-2022.	(19)
Perusahaan BUMN menyajikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dengan konsisten selama periode 2020-2022.	(32)
Laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan BUMN yang digunakan memuat informasi yang komprehensif terkait seluruh variabel yang dibutuhkan.	(2)
Jumlah perusahaan sampel.	24
Jumlah sampel selama periode penelitian: 3 Tahun x 24	72

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendapat gambaran atau deskripsi dari data masing-masing variabel dalam penelitian ini. Gambaran atau deskripsi dari data penelitian ini dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Hasil statistik deskriptif setiap variabel ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSRD	72	,13	,95	,4892	,21603
KONPOL	72	,00	9,00	5,0972	1,70467
RADEW	72	12,00	91,00	37,2361	15,67764
KOMDEW	72	2,00	5,00	3,9722	,69144
ROA	72	-58,03	59,93	1,0509	11,12639
UKPER	72	25,31	35,23	31,8673	2,30466
LEV	72	,11	1,85	,6908	,30070

Sumber: Output IBM SPSS 26, 2024

Berdasarkan data yang diberikan pada Tabel 2, tingkat *Corporate Social Responsibility Disclosure* yang diukur dengan proksi *CSRD* memiliki nilai terendah 0,13 yang diperoleh PT Reasuransi Indonesia Utama tahun 2020 dan nilai tertinggi 0,95 diperoleh PT Pelayaran Nasional Indonesia tahun 2022. Nilai mean pengungkapannya adalah 0,4892 dimana dapat diartikan bahwa perusahaan sampel telah mengungkapkan sebagian kecil konten CSR dengan total 91 konten. dengan standar deviasi 0,21603. Fakta bahwa nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan nilai meannya menunjukkan bahwa variasi data atau penyebaran nilainya relatif kecil atau dapat dikatakan baik.

Jumlah anggota dewan komisaris yang terkoneksi politik digunakan untuk mengukur tingkat koneksi politik dalam dewan komisaris. Nilai ini memiliki rentang dari 0,00 hingga 9,00. Nilai terendahnya adalah 0,00 diperoleh oleh PT Garuda Indonesia tahun 2022 dan nilai tertingginya 9,00 yang berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara tahun 2020 dan PT Bank Mandiri tahun 2020, dengan nilai mean 5,0972 dan standar deviasi 1,70467. Data penelitian ini dianggap memiliki distribusi yang konsisten dan dapat diandalkan karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan nilai meannya, yang menunjukkan variasi atau penyebaran data relatif kecil dari nilai mean.

Frekuensi rapat internal dan gabungan dewan komisaris digunakan untuk mengukur tingkat rapat dewan komisaris. Nilainya memiliki rentang antara 12,00 hingga 91,00. Nilai terendahnya adalah 12,00 berasal dari PT Pembangunan Perumahan tahun 2020, nilai tertinggi 91,00 pada PT Perkebunan Nusantara III tahun 2022, dengan nilai mean 37,2361 dan standar deviasi 15,67764. Fakta bahwa nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai meannya mengakibatkan variabilitas atau penyebaran data relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan memiliki sebaran yang konsisten dan dapat diandalkan dalam analisis yang dilakukan.

Jumlah komite dewan komisaris digunakan untuk menilai sub komite dewan komisaris. Nilainya memiliki rentang antara 2,00 hingga 5,00. Nilai terendahnya adalah 2,00 yang dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium tahun 2022, nilai tertinggi 5,00 diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2020, 2021, dan 2022, PT Bank Mandiri tahun 2020, 2021, dan 2022, PT Adhi Karya tahun 2020, 2021, dan 2022, PT Bank Negara Indonesia tahun 2020, 2021, dan 2022, dan PT Reasuransi Indonesia Utama tahun 2020, 2021, dan 2022, dengan nilai mean 3,9722 dan standar deviasi 0,69144. Fakta bahwa nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai meannya menyebabkan variabilitas atau penyebaran data relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan memiliki sebaran yang konsisten dan dapat diandalkan dalam analisis yang dilakukan.

Return on Assets (ROA) ialah rasio yang menentukan seberapa menguntungkan suatu perusahaan dari aset yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, *ROA* memiliki nilai terendah -58,03 diperoleh dari PT Garuda Indonesia tahun 2021 dan nilai tertinggi 59,93 pada PT Garuda Indonesia tahun 2022. Nilai meannya adalah 1,05909 dengan standar deviasi 11,12639. Ketika nilai standar deviasinya melebihi nilai mean, ini menunjukkan bahwa data tersebar luas dan cenderung bervariasi atau menyimpang antara satu dengan yang lainnya. Namun, nilai standar deviasi yang cukup besar menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam Return on Asset yang diukur dengan *ROA*, dimana data memiliki sebaran yang luas dan cenderung berbeda antara satu dengan lainnya.

Ukuran Perusahaan merupakan skala dari seluruh aset suatu perusahaan yang menggabungkan sumber daya untuk menciptakan jasa dan produk yang dapat dijual. Dalam penelitian ini, UKPER memiliki nilai terendah 25,31 dari PT Garuda Indonesia tahun 2022, nilai tertinggi 35,23 didapatkan oleh PT Bank Mandiri tahun 2022, dengan nilai mean 31,8673 dan standar deviasi 2,30466. Fakta bahwa nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai meannya menyebabkan variabilitas atau penyebaran data relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan memiliki sebaran yang konsisten dan dapat diandalkan dalam analisis yang dilakukan.

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang memiliki biaya tetap berupa hutang untuk mencapai tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, leverage memiliki nilai terendah 0,11 oleh Perum AirNav Indonesia tahun 2020, nilai tertinggi 1,85 dari PT Garuda Indonesia tahun 2021, nilai mean 0,6908, dan standar deviasi 0,30070. Fakta bahwa nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai meannya menyebabkan variabilitas atau penyebaran data relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan memiliki sebaran yang konsisten dan dapat diandalkan dalam analisis yang dilakukan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 4 menunjukkan hasil regresi dari model penelitian. Variabel koneksi politik dalam dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *CSR*. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa koneksi politik dalam dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap *CSR*. Variabel rapat dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *CSR*. Hasil ini sesuai dengan hipotesis kedua yaitu rapat dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *CSR*. Variabel sub komite dewan komisaris memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *CSR*. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sub komite dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *CSR*.

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,260	,514		2,451	,017
	KONPOL	,054	,024	,425	2,228	,029
	RADEW	,005	,002	,387	2,637	,010
	KOMDEW	-,081	,038	-,259	-2,132	,037

a. Dependent Variable: *CSR*

Sumber: Output IBM SPSS 26, 2024

Pengaruh Koneksi Politik dalam Dewan Komisaris terhadap *CSR*

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji t pada Tabel 4, nilai koefisien β dari variabel Koneksi Politik dalam Dewan Komisaris adalah 0,054 dengan nilai signifikansi 0,029. Karena nilai signifikansinya $0,029 < 0,05$, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Koneksi Politik dalam Dewan Komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap *CSR*. Hasil penelitian yang dilakukan belum bisa menjelaskan teori legitimasi yang menjelaskan hubungan negatif antara koneksi politik dalam dewan komisaris dengan *CSR*. Dimana dalam masyarakat non-pluralis di mana negara dapat mensejajarkan diri dengan kepentingan korporasi (Gray dkk., 1996), perusahaan dapat menggunakan koneksi politik sebagai strategi yang lebih penting untuk kelangsungan hidup mereka daripada melegitimasi melalui *CSR* perusahaan. Hasil studi ini selaras dengan penelitian terdahulu milik Bianchi dkk., (2019) yang menunjukkan bahwasanya koneksi politik dalam dewan berpengaruh positif terhadap *CSR* di Portugal yang menggunakan pandangan legitimasi. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang memiliki koneksi politik harus menghadapi kekhawatiran reputasi yang signifikan, yang dapat setara dengan masalah legitimasi, dan *CSR* dapat dilihat sebagai strategi yang ditetapkan untuk memperoleh dukungan pemangku kepentingan dan mengurangi ancaman legitimasi.

Pengaruh Rapat Dewan Komisaris terhadap CSRD

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji t pada Tabel 4, variabel Rapat Dewan Komisaris memiliki nilai koefisien β positif sebesar 0,005 dan nilai signifikansi 0,013. Karena nilai signifikansinya $0,013 < 0,05$, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa CSRD dipengaruhi secara signifikan oleh Rapat Dewan Komisaris. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa rapat dewan meningkatkan pengungkapan etis karena bisa meminimalisir penyimpangan informasi antar dewan. Menurut perspektif teori agensi, CSRD digunakan untuk menyelaraskan kepentingan dewan dan *stakeholders*. Hasil studi ini selaras dengan penelitian lain seperti Khairredine dkk. (2020) yang juga mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara rapat dewan dengan CSRD menggunakan perspektif agensi di Perancis. Berdasarkan dari hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa jumlah rapat yang lebih banyak dapat mengurangi kemungkinan masalah asimetri informasi karena dengan rapat yang lebih sering, fungsi pengawasan dan kontrol yang diatribusikan pada dewan lebih efisien dan konsekuensinya perusahaan akan lebih termotivasi untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang etika mereka dalam upaya memperoleh legitimasi.

Pengaruh Sub Komite Dewan Komisaris terhadap CSRD

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji t pada Tabel 4, variabel Sub Komite Dewan Komisaris memiliki nilai koefisien β sebesar -0,081 dengan nilai signifikansi 0,037. Karena nilai signifikansinya $0,037 < 0,05$, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa Sub Komite Dewan Komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap CSRD. Hasil penelitian yang diperoleh belum dapat menjelaskan teori agensi dalam menjelaskan hubungan positif antara sub komite dewan komisaris dengan CSRD. Dimana menurut teori agensi kekuasaan dan tanggung jawab didistribusikan dengan membentuk komite dewan independen sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani kegiatan CSR dengan mengurangi konflik agensi (Masud dkk., 2018). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Abang'a dan Taurigana, 2023), dimana dijelaskan adanya hubungan negatif dan signifikan antara sub komite dewan dengan CSRD di Kenya menggunakan perspektif agensi. Klarifikasi yang mungkin terjadi terhadap hasil ini adalah sub komite dewan komisaris kurang berkuasa untuk memberi dampak berarti pada CSRD. Hal ini karena tugas utama sub komite dewan komisaris lebih bersifat memberikan saran kepada dewan komisaris yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan menerapkan kebijakan yang direkomendasikan atau tidak

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bahasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, koneksi politik dalam dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). Ini berarti bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris yang memiliki koneksi politik di perusahaan BUMN, maka tingkat CSRD cenderung semakin meningkat. Kedua, frekuensi rapat dewan komisaris juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap CSRD. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, semakin tinggi pula tingkat CSRD yang dihasilkan. Namun, temuan ketiga menunjukkan hasil yang berbeda, di mana jumlah sub komite dewan komisaris justru berpengaruh negatif secara signifikan terhadap CSRD. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak sub komite dewan komisaris yang ada, tingkat CSRD cenderung menurun.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah data sampel yang dapat dianalisis terbatas karena tidak memenuhi kriteria tertentu untuk keperluan analisis penelitian. Kedua, penelitian hanya berfokus pada karakteristik dewan



komisaris sebagai variabel independen, sehingga terdapat dua hipotesis yang ditolak. Lingkup penelitian terbatas pada satu aspek saja dapat menjadi penyebab ditolaknya beberapa hipotesis penelitian.

Merujuk pada keterbatasan penelitian ini, terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, direkomendasikan menggunakan populasi penelitian yang lebih luas cakupannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan anak perusahaan BUMN sebagai objek penelitian, bukan terbatas pada induk perusahaan saja. Kedua, penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel yang diteliti, tidak terbatas pada karakteristik dewan komisaris semata, tetapi juga mencakup dewan direksi perusahaan atau menambahkan variabel lainnya yang berhubungan dengan karakteristik dewan. Ketiga, masih banyaknya induk perusahaan BUMN di Indonesia yang belum membuat laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara berkala. Maka dari itu, perlu adanya regulasi terkait pembuatan laporan tahunan dan keberlanjutan secara berkala.



REFERENSI

- Abang'a, A. O. g., & Tauringana, V. (2023). The impact of board characteristics on corporate social responsibility disclosures: evidence from state-owned enterprises in Kenya. *Journal of Accounting in Emerging Economies*. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2022-0008>
- Agarwala, N., Pareek, R., & Sahu, T. N. (2023). Does board independence influence CSR performance? A GMM-based dynamic panel data approach. *Social Responsibility Journal*, 19(6), 1003–1022. <https://doi.org/10.1108/SRJ-10-2020-0433>
- Al Maeni, F., Ellili, N. O. D., & Nobanee, H. (2022). Impact of corporate governance on corporate social responsibility disclosure of the UAE listed banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-11-2021-0424>
- Ashfaq, K., & Rui, Z. (2019). Revisiting the relationship between corporate governance and corporate social and environmental disclosure practices in Pakistan. *Social Responsibility Journal*, 15(1), 90–119. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2017-0001>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2022* (15th ed.). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Benlemlih, M., & Girerd-Potin, I. (2017). Corporate social responsibility and firm financial risk reduction: On the moderating role of the legal environment. *Journal of Business Finance and Accounting*, 44(7–8), 1137–1166. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12251>
- Bianchi, M. T., Monteiro, P., Azevedo, G., Oliveira, J., Viana, R. C., & Branco, M. C. (2019). Political connections and corporate social responsibility reporting in Portugal. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1203–1215. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2018-0111>
- Citradi, T. (2020). Relawan Jokowi yang Jadi Menteri-Komisaris BUMN, Ini Listnya! Retrieved March 18, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201103150646-4-199019/relawan-jokowi-yang-jadi-menteri-komisaris-bumn-ini-listnya>
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). *An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy theory*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* (Vol. 15). <https://doi.org/10.1108/09513570210435861>
- Deegan, C., & Unerman, J. (2006). *Financial Accounting Theory European Edition*.
- Dieleman, M., & Widjaja, H. (2019). How powerful political ties appropriate resources and how weaker organizations protect themselves: A case study from Indonesia. *Asia Pacific Journal of Management*, 36(1), 61–86. <https://doi.org/10.1007/s10490-018-9563-2>
- Dwekat, A., Seguí-Mas, E., Zaid, M. A. A., & Tormo-Carbó, G. (2022). Corporate governance and corporate social responsibility: mapping the most critical drivers in the board academic literature. *Meditari Accountancy Research*, 30(6), 1705–1739. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-01-2021-1155>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1).
- Fahad, P., & Rahman, P. M. (2020). Impact of corporate governance on CSR disclosure. *International Journal of Disclosure and Governance*, 17(2–3), 155–167. <https://doi.org/10.1057/s41310-020-00082-1>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting* (2nd ed.). London: Prentice Hall.



- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political connections, related party transactions, and auditor choice: Evidence from Indonesia. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004>
- Indira, M., & Syafruddin, M. (2021). Pengaruh Karakteristik Dewan Dan Komite Audit Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–10. Retrieved from <https://repofeb.undip.ac.id/10182/>
- Jahid, M. A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., Haryono, S., & Jatmiko, B. (2020). Impact of corporate governance mechanisms on corporate social responsibility disclosure of publicly-listed banks in Bangladesh. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(6), 61–71. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.061>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Katmon, N., Mohamad, Z. Z., Norwani, N. M., & Farooque, O. Al. (2019). Comprehensive Board Diversity and Quality of Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from an Emerging Market. *Journal of Business Ethics*, 157(2), 447–481. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3672-6>
- Kementrian BUMN. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia, (2023). Indonesia. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045>
- Khaireddine, H., Salhi, B., Aljabr, J., & Jarboui, A. (2020). Impact of board characteristics on governance, environmental and ethical disclosure. *Society and Business Review*, 15(3), 273–295. <https://doi.org/10.1108/SBR-05-2019-0067>
- Masoud, N., & Vij, A. (2021). Factors influencing corporate social responsibility disclosure (CSR) by Libyan state-owned enterprises (SOEs). *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1859850>
- Masud, M. A. K., Nurunnabi, M., & Bae, S. M. (2018). The effects of corporate governance on environmental sustainability reporting: empirical evidence from South Asian countries. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*. <https://doi.org/10.1177/000331970405500102>
- Mohammadi, S., Saeidi, H., & Naghshbandi, N. (2021). The impact of board and audit committee characteristics on corporate social responsibility: evidence from the Iranian stock exchange. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 70(8), 2207–2236. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-10-2019-0506>
- Muttakin, M. B., Mihret, D. G., & Khan, A. (2018). Corporate political connection and corporate social responsibility disclosures: A neo-pluralist hypothesis and empirical evidence. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(2), 725–744. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2015-2078>
- Nugrahanti, Y. W. (2021). Do Political Connection and Corporate Governance Mechanism Increase Corporate Social Responsibility Disclosure? *International Journal of Applied Business Research*, 3(2), 28–46. <https://doi.org/10.35313/ijabr.v3i2.147>
- Nugraheni, P., & Khasanah, E. N. (2019). Implementation of the AAOIFI index on CSR disclosure in Indonesian Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 17(3), 365–382. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2018-0013>
- Paek, S., Xiao, Q., Lee, S., & Song, H. (2013). Does managerial ownership affect different corporate social responsibility dimensions? An empirical examination of U.S. publicly traded hospitality firms. *International Journal of Hospitality Management*, 34(1), 423–433. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.12.004>
- Salsabilla, A. I., Indriani, E., & Kartikasari, N. (2022). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan BUMN. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 394–406.
- Sánchez, R. G., López-Pérez, M. V., & López-Hernández, A. M. (2018). Current trends in



- research on social responsibility in state-owned enterprises: A review of the literature from 2000 to 2017. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/su10072403>
- Saraswati, E., Sagitaputri, A., & Rahadian, Y. (2020). Political Connections and CSR Disclosures in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 1097–1104. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.1097>
- Tang, P., Yang, S., & Yang, S. (2020). How to design corporate governance structures to enhance corporate social responsibility in China's mining state-owned enterprises? *Resources Policy*, 66(388), 101619. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101619>
- Walls, J. L., Berrone, P., Phan, P. H., Walls, J. L., Berrone, P., & Phan, P. H. (2012). CORPORATE GOVERNANCE AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE: IS THERE REALLY A LINK? *Strategic Management Journal*, 33(8), 885–913.
- Yuliani. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Kompas 100. *JWM (Jurnal Wawasan Manajemen)*, 6(3), 209. <https://doi.org/10.20527/jwm.v6i3.164>